



Kepemimpinan Prosedural dalam Penguatan Soliditas Partai Golkar Kota Jambi pada Pilkada Serentak 2024

Ica Fitriani^{1*}, Dimas Subekti², Ian Pasaribu³

¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia

²⁻³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: icafitriani94@gmail.com

Abstract. *The 2024 regional elections in Jambi City sparked internal conflict within the Golkar Party when the recommendations of the Regional Representative Council II did not align with the Central Executive Board's decision regarding the mayoral candidate. The tension was successfully resolved through the implementation of procedural leadership based on the party's statutes and regulations, as well as a tiered nomination mechanism. This study aims to understand the role of procedural leadership in restoring solidarity and maintaining organizational stability after a nomination conflict. Using a qualitative approach with case studies, the study collected data through in-depth interviews and documentation with informants selected through purposive and snowball sampling. Data analysis was conducted using the Miles & Huberman model through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that procedural mechanisms, the use of surveys, and the exemplary behavior of charismatic figures particularly the chair of the DPD II play an important role in alleviating cadre disappointment. This study confirms that procedural leadership is a key instrument in maintaining the solidarity of the Golkar Party and recommends strengthening internal communication and balancing surveys with regional aspirations.*

Keywords: 2024 Regional Elections; Charismatic Figure; Internal Conflict; Party Solidarity; Procedural Leadership.

Abstrak. Pilkada 2024 di Kota Jambi memunculkan konflik internal Partai Golkar ketika rekomendasi DPD II tidak sejalan dengan keputusan DPP mengenai calon Wali Kota. Ketegangan tersebut berhasil diredam melalui penerapan kepemimpinan prosedural yang berlandaskan AD/ART serta mekanisme pencalonan berjenjang. Penelitian ini bertujuan memahami peran kepemimpinan prosedural dalam memulihkan soliditas dan menjaga stabilitas organisasi pasca konflik pencalonan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian menghimpun data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi dengan informan yang dipilih lewat purposive dan snowball sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme prosedural, penggunaan survei, serta keteladanan tokoh karismatik khususnya ketua DPD II berperan penting meredakan kekecewaan kader. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan prosedural menjadi instrumen utama dalam menjaga soliditas Partai Golkar serta merekomendasikan penguatan komunikasi internal dan keseimbangan antara survei dan aspirasi daerah.

Kata kunci: Kepemimpinan Prosedural; Konflik Internal; Pilkada 2024; Soliditas Partai; Tokoh Karismatik.

1. LATAR BELAKANG

Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan yang diadakan 5 tahun sekali untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pilkada ini dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu wujud demokrasi di Indonesia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, 2020)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) serentak tahun 2024 merupakan salah satu momen politik paling krusial bagi berbagai daerah di Indonesia, terutama Kota Jambi yang tengah menghadapi persaingan pemilihan umum yang sangat dinamis. Partai Golkar, sebagai salah

satu partai besar dengan rekam jejak yang solid di tingkat lokal, kini berada dalam posisi yang menguntungkan setelah berhasil memenangkan delapan kursi di DPRD Kota Jambi melalui pemilihan umum 2024 (Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, 2024). Kemenangan ini menunjukkan bahwa mekanisme partai beroperasi dengan efisien dan memiliki dasar dukungan yang kokoh. Namun, situasi ini berubah ketika perbedaan pendapat muncul antara DPD II Kota Jambi dan DPP Partai Golkar terkait pemilihan calon wali kota yang akan didukung dalam pemilihan umum 2024. Perbedaan pendapat ini memicu ketegangan di dalam partai dan menimbulkan keraguan tentang stabilitas organisasi mereka ke depannya. Menurut, Surbakti (2020) Konflik antara struktur pusat dan daerah dalam partai politik memang umum terjadi dalam sistem kepartaian Indonesia, terutama ketika keputusan politik pusat tidak sejalan dengan aspirasi kader di tingkat lokal

Perselisihan timbul setelah DPD II Kota Jambi mencalonkan Budi Setiawan sebagai calon wali kota dengan alasan dukungan dari sebagian besar kecamatan, sementara DPP memutuskan pasangan Maulana–Diza sebagai calon resmi. Keputusan ini memicu protes keras dari beberapa anggota partai yang merasa kepentingan daerah tidak diakomodasi. Ketegangan seperti ini sejalan dengan temuan Idayat, F. dan Prasetyo (2022) yang menyebutkan bahwa konflik elite dalam Pilkada sering dipicu oleh perebutan pengaruh dan perbedaan preferensi kandidat antara pengurus pusat dan daerah. Dinamika ini kemudian menempatkan Partai Golkar di Kota Jambi pada tahap yang memerlukan kepemimpinan yang fokus dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Ketegangan yang awalnya meningkat akhirnya mereda setelah kepemimpinan partai menerapkan mekanisme musyawarah berjenjang dan kembali pada pedoman organisasi seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan petunjuk pelaksanaan pencalonan. Dengan langkah ini, keputusan dari kepemimpinan pusat sepenuhnya diterima. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang menekankan mekanisme prosedural memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas organisasi, terutama ketika keputusan strategis menimbulkan perbedaan yang signifikan di tingkat regional.

Penelitian ini menciptakan peluang penting untuk mengembangkan kajian baru tentang bagaimana mekanisme kepemimpinan prosedural berfungsi dalam kondisi krisis internal. Konflik dalam pemilihan calon yang dihadapi Partai Golkar di Kota Jambi menunjukkan bahwa tekanan di dalam partai dapat berkembang menjadi risiko disintegrasi jika tidak ditangani dengan mekanisme yang transparan. Namun, Golkar berhasil kembali ke keputusan pusat melalui pendekatan kepemimpinan yang didasarkan pada aturan, proses bertahap, dan disiplin struktural. Fenomena ini memberikan bukti bahwa pola kepemimpinan prosedural memiliki dampak besar terhadap kemampuan partai untuk mempertahankan kesatuan di tengah

aspirasi yang berbeda-beda.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana kepemimpinan prosedural dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ketika partai-partai dihadapkan pada perbedaan dalam keputusan strategis. Pemilihan kepala daerah seringkali menjadi ajang yang memperkuat ketegangan internal, terutama dalam hal pencalonan yang melibatkan kepentingan politik di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, analisis penerapan mekanisme organisasi untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini sangat penting, terutama bagi partai besar seperti Golkar yang memiliki struktur hierarkis dan tradisi kepemimpinan yang kuat.

Penelitian ini bertujuan menguraikan secara mendalam bagaimana kepemimpinan prosedural dijalankan oleh Partai Golkar Kota Jambi pasca konflik penetapan calon Wali Kota pada Pilkada 2024 serta menilai sejauh mana penerapan mekanisme kepemimpinan yang berlandaskan aturan tersebut mampu memperkuat soliditas partai di tengah dinamika politik internal yang terjadi. Melalui kajian ini diharapkan lahir pemahaman yang lebih utuh mengenai bentuk-bentuk kepemimpinan yang efektif bagi partai politik ketika menghadapi perbedaan aspirasi antara struktur pusat dan daerah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik tata kelola organisasi yang lebih stabil, adaptif, dan berdaya tahan pada situasi politik lokal yang terus berkembang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori solidaritas partai yang dikembangkan oleh Firman Noor (2015) menjadi landasan utama untuk menjelaskan bagaimana sebuah partai dapat mempertahankan kesatuan internalnya saat menghadapi persaingan politik dan perbedaan kepentingan di kalangan elit. Ia menganggap solidaritas sebagai kemampuan partai untuk mempertahankan kohesi, loyalitas anggota, dan stabilitas organisasi melalui mekanisme terstruktur dan kepemimpinan yang efisien. Menurut, Sari, L. dan Ramadhan (2022) Loyalitas kader menjadi komponen fundamental bagi soliditas internal, terutama dalam situasi ketika keputusan partai tidak sesuai dengan preferensi basis lokal. Solidaritas tidak berarti ketiadaan konflik, melainkan kemampuan partai untuk menangani konflik menggunakan aturan, komunikasi struktural, dan kepemimpinan multilevel. Dalam pandangan ini, stabilitas organisasi ditentukan tidak hanya oleh struktur formal, tetapi juga oleh kualitas manajemen internal yang dilakukan oleh elit partai.

Dalam studi ini, solidaritas dipahami dari perspektif kepemimpinan prosedural, yang berfungsi sebagai alat pengendalian utama bagi pihak-pihak untuk menjaga ketertiban internal.

Kepemimpinan prosedural menyoroti pentingnya melaksanakan setiap proses organisasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak terkait. Jenis kepemimpinan ini tidak bergantung pada preferensi pribadi, melainkan pada prosedur resmi yang mengatur bagaimana keputusan harus diambil, disebarluaskan, dan diimplementasikan di semua tingkatan organisasi. Dalam situasi di mana perselisihan timbul akibat perbedaan keputusan politik antara tingkat pusat dan daerah, kepemimpinan prosedural menjadi faktor penentu dalam menjaga kohesi anggota.

Indikator utama kepemimpinan prosedural adalah mekanisme pengambilan keputusan. Firman Noor (2015) berpendapat bahwa partai yang kuat harus memiliki aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang transparan dan terorganisir, yang diikuti oleh semua anggota. Mekanisme yang terstandarisasi meminimalkan risiko konflik karena keputusan dianggap telah diambil melalui prosedur yang sah. Pengambilan keputusan yang mengikuti hierarki memungkinkan anggota menerima keputusan meskipun tidak selalu sejalan dengan kepentingan regional, karena keputusan tersebut dianggap sah di dalam organisasi. Dalam partai besar seperti Golkar, mekanisme ini memainkan peran penting dalam menghindari polarisasi di dalam partai. Kepemimpinan prosedural menuntut setiap tahapan organisasi mengikuti aturan baku, sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi struktural (Nurdin, 2021)

Indikator kedua adalah peran tokoh karismatik, yaitu individu yang dihormati oleh anggota, memiliki otoritas moral, dan mampu mengarahkan dinamika organisasi menuju stabilitas. Firman Noor (2015) menekankan bahwa karisma pemimpin seringkali melengkapi mekanisme formal. Ketika struktur organisasi mengalami ketegangan, pemimpin karismatik dapat meredakan konflik melalui teladan dan persuasi, mengingat budaya politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh hubungan pribadi dan patronase. Pemimpin semacam ini mampu menjembatani keputusan pusat dan aspirasi regional, sehingga membantu partai-partai mempertahankan kesatuan.

Beberapa studi dalam lima tahun terakhir telah memperkuat kerangka teoritis ini. Anawati & Al-Hamdi (2020) menemukan bahwa kekuatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap kokoh berkat kombinasi mekanisme organisasi yang disiplin dan peran pemimpin yang dihormati oleh anggota. Dewangga & Solihah (2023) menunjukkan bahwa perekrutan politik yang dikendalikan oleh elit dapat menimbulkan ketegangan internal jika mekanisme pengambilan keputusan tidak berfungsi secara konsisten. Subekti & Al-Hamdi (2024) menekankan bahwa solidaritas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan regional Surakarta 2020 dipertahankan tidak hanya oleh kekuatan aturan formal

tetapi juga oleh peran tokoh kunci yang mampu mempersatukan anggota saat perbedaan pendapat muncul. Ketiga studi ini memperkuat argumen bahwa kombinasi antara mekanisme pengambilan keputusan reguler dan peran figur karismatik merupakan persyaratan penting untuk mempertahankan solidaritas partai.

Dengan demikian, teori soliditas Firman Noor (2015), yang ditekankan melalui aspek kepemimpinan prosedural, menjadi dasar untuk memahami bagaimana Partai Golkar Kota Jambi dapat mempertahankan kesatuan organisasinya setelah menghadapi konflik internal pada Pilkada Serentak 2024. Kajian teoritis ini sekaligus menjadi landasan analitis bagi penelitian untuk menilai efektivitas mekanisme partai dan peran tokoh dalam memelihara loyalitas, stabilitas, dan keharmonisan kader.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan prosedural berkontribusi dalam memperkuat solidaritas Partai Golkar di Kota Jambi setelah perselisihan terkait pemilihan calon wali kota dalam Pemilihan Umum Daerah Serentak 2024. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami proses pengambilan keputusan, interaksi antara struktur partai, dan dinamika persatuan yang terjadi sepanjang tahapan pemilihan.

Informan dipilih melalui sampling purposif dan diperluas dengan sampling snowball. Mereka meliputi administrator DPD II dan DPD I Partai Golkar, anggota partai, serta pengamat politik yang memahami proses pencalonan dan situasi internal partai. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan informan, serta dokumentasi seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, notulen rapat, arsip survei elektabilitas, laporan media, dan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai informasi pendukung.

Analisis data menggunakan model Miles & Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahap: pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara berulang. Pengurangan data dilakukan untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara tema-tema, sementara kesimpulan ditarik berdasarkan interpretasi komprehensif dari data yang telah diorganisir. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dengan membandingkan temuan wawancara dan dokumen pendukung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini di fokuskan pada upaya memahami bagaimana dimensi kepemimpinan prosedural berjalan dalam Partai Golkar di Pilkada serentak 2024 dengan menyoroti 2 aspek utama kepemimpinan procedural yaitu proses pengambilan keputusan dan tokoh karismatik,yaitu sebagai berikut:

a. Proses Pengambilan Keputusan

Pada indikator ini mengukur bagaimana Partai Golkar Kota Jambi menjalankan proses pengambilan keputusan mengenai pencalonan Wali Kota Jambi 2024, dan apakah mekanisme tersebut sesuai dengan prinsip prosedural: demokratis, terstruktur, dan selaras dengan ketentuan organisasi. Dalam struktur Golkar, pengambilan keputusan bukan hanya proses administratif, tetapi juga merupakan mekanisme institusional yang mencerminkan budaya politik Golkar sebagai partai modern yang menggabungkan tradisi musyawarah, hierarki organisasi, dan pendekatan ilmiah melalui survei elektabilitas. Penentuan pasangan calon oleh partai politik sangat bergantung pada strategi kemenangan dan pertimbangan elektabilitas kandidat (Sandi, R. dan Mulyadi, 2021).

Sesuai dengan AD/ART Partai Golkar Bab V Pasal 18 menegaskan bahwa kewenangan menetapkan pasangan calon kepala daerah berada sepenuhnya di tangan DPP, sementara DPD I dan DPD II hanya berperan dalam proses penjurian, verifikasi, dan penyampaian rekomendasi. Hal ini ditegaskan pula dalam Juklak 06/DPP/GOLKAR/V/2021, yang menjelaskan bahwa penetapan calon Golkar wajib mengacu pada hasil survei minimal tiga lembaga dan menggunakan kriteria objektif seperti elektabilitas, kapasitas, dan peluang menang. Dalam banyak kasus Pilkada, partai mengutamakan hasil survei sebagai dasar penentuan calon karena dianggap mampu menggambarkan peluang kemenangan secara objektif (Yusuf, M. dan Akbar, 2023). Dengan demikian, Golkar secara sistematis memastikan bahwa keputusan pencalonan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga berbasis riset elektoral.

Wawancara dengan para informan mengungkap dinamika pengambilan keputusan politik dalam proses penentuan calon Wali Kota Jambi di tubuh Partai Golkar. Secara umum, seluruh informan menggambarkan bahwa alur pencalonan berjalan melalui mekanisme struktural dari tingkat PL, PK, DPD II, DPD I, hingga akhirnya diputuskan secara final oleh DPP. Namun, temuan lapangan menunjukkan adanya ketegangan antara aspirasi daerah dan keputusan pusat.

Iin Habibi selaku Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Golkar Prov. Jambi, memberikan gambaran paling jelas mengenai bagaimana proses pencalonan berlangsung dari tingkat DPD II hingga ke DPP. Ia mengatakan secara rinci bahwa:

“DPD I Provinsi Jambi sebenarnya tidak memiliki kewenangan penuh. Kami hanya berfungsi sebagai saluran formal untuk menyampaikan usulan dari kabupaten/kota. Jadi ketika DPD II Kota Jambi mengusulkan tiga nama, kami menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi internal dan kemudian membawa nama-nama tersebut ke DPP. Pada akhirnya keputusan itu bukan berada di DPD I maupun DPD II, tetapi sepenuhnya berada di DPP. Itu aturan AD/ART dan kami hanya menjalankan saja.” (Wawancara, 27 Oktober 2025)”.

Iin juga menegaskan bahwa meski DPD II mengusulkan Budi Setiawan sebagai calon tunggal berdasarkan pleno 11 kecamatan, DPP tetap memilih Maulana–Diza. Ia menjelaskan lebih mendalam alasan keputusan itu:

“DPP mengambil keputusan berdasarkan survei. Hasil survei yang kami terima dari tiga lembaga menunjukkan bahwa Maulana–Diza unggul sangat signifikan, di atas 80%. Sementara elektabilitas Pak Budi tidak masuk tiga besar. Maka secara ilmiah dan rasional, partai harus memilih kandidat yang memiliki peluang menang terbesar. Ini bukan masalah suka atau tidak suka, tetapi ini masalah rasionalitas politik.” (Wawancara, 27 Oktober 2025).

Budi Setiawan selaku Ketua DPD II Golkar Kota Jambi, memberikan narasi yang lebih dalam mengenai bagaimana pencalonannya muncul dari bawah:

“Saya diusulkan oleh 11 kecamatan melalui mekanisme musyawarah di tingkat PL dan PK. Semua kecamatan sepakat mengusung saya. Setelah itu, DPD II menggelar rapat pleno dan memutuskan bahwa saya yang direkomendasikan maju sebagai calon Wali Kota Jambi. Semua itu dilakukan secara prosedural, tidak ada yang melanggar mekanisme organisasi.” (Wawancara, 27 Oktober 2025).

Namun Budi juga menjelaskan bahwa ketika keputusan DPP berbeda, ia tetap menerima:

“Saya harus menerima karena AD/ART menegaskan bahwa keputusan DPP adalah final. Kita boleh berbeda pendapat di bawah, kita boleh punya aspirasi, tetapi ketika keputusan itu keluar, seluruh struktur harus patuh.” (Wawancara, 25 Oktober 2025).

Mumtaz Mona selaku Sekretaris DPD II Golkar Kota Jambi menjelaskan detail teknis alur administrasi:

“Saya sebagai sekretaris memastikan seluruh proses administrasi penjaringan,

verifikasi berkas calon, laporan dari panitia penjangkaran, hingga pleno berjalan sesuai mekanisme. Semua sudah sesuai aturan.” (Wawancara, 25 Oktober 2025).

Ia juga mengatakan bahwa DPD I telah melakukan musyawarah secara terbuka kepada DPD II untuk menjelaskan keputusan DPP.

Yuliantie ismail selaku kader dan wakil ketua Himpunan wanita karya menjelaskan juga bagaimana proses pencalonan:

“Pencalonan Pak Budi benar-benar muncul dari bawah. PL dan PK memberikan dukungan penuh. Tapi ketika DPP memutuskan Maulana–Diza, kami diajak berdiskusi dan dijelaskan alasan survei. Setelah itu semua bisa menerima, meski awalnya ada kekecewaan.” (Wawancara, 25 Oktober 2025).

Menurut Dr. Pahrudin HM, M.A. selaku Pengamat Politik memberikan analisis struktural:

“Golkar sejak dulu memang sentralistik. Walaupun daerah melakukan penjangkaran terbuka, penentu tetap DPP. Di kasus Jambi, DPP menggunakan survei sebagai dasar, dan itu sesuai pola nasional.” (Wawancara, 23 Oktober 2025).

Menurut Citra Darminto, S.IP., M.MP. selaku Akademisi Politik menilai secara tajam, bahwa proses pengambilan keputusan tidak sepenuhnya demokratis dan tidak sepenuhnya sesuai aturan internal:

“saya rasa pengambilan keputusan politik di Partai Golkar belum berjalan dengan demokratis dan sesuai aturan partai, Ketuanya sendiri saja itu tidak diusung, padahal sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Ini tentu tidak baik bagi demokrasi dalam organisasi politik.” (Wawancara Akademisi Politik, 10 November 2025).

Pernyataan ini didukung oleh fakta pemberitaan dari MakalamNews(2024) yang berjudul “Partai Golkar Lebih Pilih Maulana-Diza Pilwako Jambi 2024 Daripada Dukung Budi Setiawan, Ini Sebabnya” dari berita ini menjelaskan bahwa DPP Partai Golkar secara resmi menetapkan Maulana-Diza sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi berdasarkan hasil survei tahap ketiga yang menunjukkan keunggulan elektabilitas pasangan ini dibanding kandidat lain, termasuk kader potensial dari internal partai.

“DPP Partai Golkar sudah memutuskan Maulana dan Diza sebagai calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Jambi dari Partai Golkar, berdasarkan pertimbangan matang dan hasil survei tahap ketiga, elektabilitas Maulana-Diza lebih unggul dari kader Golkar Budi Setiawan.”

Secara keseluruhan, hasil dari wawancara ini menggambarkan bahwa meskipun jalur formal pencalonan di Partai Golkar bersifat prosedural dan aspiratif di tingkat

daerah, keputusan strategis tetap terpusat pada DPP. Rasionalitas elektoral melalui penggunaan survei menjadi faktor dominan yang mengalahkan preferensi struktur bawah, sehingga menciptakan ketegangan antara aspirasi daerah dan keputusan pusat, meski pada akhirnya seluruh struktur tetap tunduk pada aturan organisasi.

b. Peran Tokoh Karismatik

Peran Tokoh Karismatik dalam konteks Partai Golkar Kota Jambi menjadi sangat relevan karena Golkar memiliki tradisi panjang tentang patronase politik dan kepemimpinan berbasis figur. Literatur politik Indonesia menyebut Golkar sebagai partai dengan struktur patrimonial-hierarkis, di mana tokoh senior memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai pengambil keputusan formal, tetapi juga sebagai “penafsir kebijakan” dan “penjaga harmoni internal.” Dalam Golkar, tokoh seperti Ketua DPD II, Ketua DPD I, dan tokoh senior (dewan pertimbangan) memainkan peran yang sangat sentral. AD/ART Golkar Bab VIII mengatur fungsi Dewan Pertimbangan sebagai unsur yang memberikan *pertimbangan strategis*, *nasihat*, dan *arahan moral* fungsi yang pada praktiknya sangat beririsan dengan kepemimpinan karismatik.

Wawancara menunjukkan bahwa DPD I memanfaatkan kewibawaan tokoh senior dan dewan pertimbangan untuk menjelaskan alasan keputusan pusat, terutama terkait hasil survei elektabilitas. Di tingkat DPD II, peran Budi Setiawan sebagai ketua menjadi kunci meredam kekecewaan kader melalui komunikasi informal, pendekatan personal, dan keteladanan dalam menerima keputusan pusat.

Iin adalah informan yang paling jelas menggambarkan bagaimana tokoh senior dan ketua partai memainkan peran penentu dalam menjaga stabilitas ketika DPP memutuskan mengusung Maulana–Diza. Iin menjelaskan secara mendalam:

“Pada saat keputusan DPP keluar, kami di DPD I melihat ada dinamika yang cukup keras di lapangan, terutama dari pihak yang merasa aspirasinya tidak terakomodasi. Karena itu, tokoh senior Golkar turun langsung, memanggil seluruh pihak yang berbeda pendapat, baik yang pro Budi maupun yang mendukung keputusan DPP. Mereka duduk bersama, dibicarakan secara terbuka, dijelaskan kenapa keputusan itu keluar.” (Wawancara, 27 Oktober 2025).

Sebagai Ketua DPD II Kota Jambi yang menjadi aktor utama dalam dinamika pencalonan, Budi Setiawan memainkan peran karismatik yang sangat kuat. Ia menceritakan:

“Ketika keputusan pusat keluar, saya tahu banyak kader yang kecewa. Itu manusiawi. Tapi tugas saya sebagai ketua adalah membuat mereka mengerti bahwa keputusan itu

bukan karena saya tidak dipilih, tetapi karena partai melihat peluang kemenangan yang lebih besar. Jadi saya panggil satu-satu kader yang tidak menerima. Saya jelaskan aturan organisasi, saya jelaskan mekanisme survey dan sebagai ketua, saya harus jadi teladan. Kalau saya tidak menerima keputusan pusat, bagaimana kader mau taat? Karena itu saya tekankan, kita tetap solid, kita tetap organisasi, dan kader harus mengutamakan kepentingan partai.” (Wawancara, 25 Oktober 2025).

Budi menambahkan kalimat panjang yang sangat menunjukkan peran figur:

“Kader Golkar itu punya hubungan emosional dengan ketua DPD II. Jadi kalau ketua menerima keputusan, mereka akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya. Karena itu saya menjaga komunikasi informal dengan mereka. Saya temui satu persatu, saya beri pemahaman. Itu kunci mengapa kami bisa cepat solid kembali.” (Wawancara, 25 Oktober 2025).

Mumtaz Mona memberikan gambaran lain yang mempertegas peran ketua:

“Sebenarnya dinamika di awal itu cukup panas. Ada kader yang merasa kerja keras mereka tidak dihargai. Tapi figur ketua DPD II itu sangat menentukan. Beliau bisa meredam suasana dengan pendekatan personal”. (25 Oktober 2025).

Yuliantie Ismail memberi gambaran dari sisi bawah:

“Kami di PK dan PL itu sebenarnya awalnya berat menerima keputusan pusat. Karena kami sudah mengusulkan Budi Setiawan secara bulat. Tapi karena ketua kami menjelaskan bahwa itu keputusan yang harus diterima, dan karena beliau sendiri bersikap dewasa, kami pun ikut.” (Wawancara, 25 Oktober 2025).

Dr. Pahrudin HM, M.A. selaku Pengamat Politik memberikan analisis teoritis:

“Loyalitas kader Golkar sering kali berbasis figur, bukan institusi. Ini bukan hanya di Jambi, tetapi fenomena nasional. Ketika figur ketua mengambil sikap dewasa menerima keputusan DPP, maka kader akan ikut. Tanpa peran figur, konflik internal bisa berkepanjangan, Dalam kasus Jambi, peran Budi sangat besar. Meskipun beliau tidak direkomendasikan, beliau tetap ikut memenangkan Maulana–Diza. Itu menunjukkan kekuatan figur dan kultur kepemimpinan karismatik dalam Golkar.” (Wawancara, 23 Oktober 2025).

Menurut Citra Darminto, S.IP., M.MP. menegaskan bahwa tokoh-tokoh karismatik Golkar sangat berpengaruh dalam menetralsir konflik dan menjaga kesatuan sikap kader. Peran tokoh senior terbukti mampu meredam ketegangan ketika keputusan pengusungan tidak sesuai aspirasi bawah. Ia mengatakan:

“Ada pengaruh tokoh-tokoh karismatik yang meredam gejolak, terutama saat

keputusan tidak mengusung Budi, mereka mampu meminimalisasi konflik itu.” (Wawancara, 10 November 2025).

Pernyataan diperkuat dari berita dari JambiLink.id (2024) yang berjudul “Budi Setiawan Deklarasikan Dukungan dan Tegaskan Golkar Solid Bersama Maulana-Diza” ini sejalan dengan temuan wawancara yang menyoroti peran tokoh senior dan Dewan Pertimbangan Golkar dalam menjaga harmoni internal, meredam konflik, serta membangun komitmen bersama sehingga seluruh struktur partai bekerja kooperatif demi keberhasilan pencalonan. Peran karismatik Budi menjadi penentu penting dalam mengelola dinamika internal dan menjaga kesatuan partai dalam momentum politik yang krusial ini.

"Budi Setiawan menegaskan loyalitas terhadap partai dan menginstruksikan mesin partai untuk mendukung seluruh program kemenangan Maulana-Diza di Pilkada Kota Jambi. Ia mengajak seluruh kader untuk solid dan bersatu dalam memenangkan pasangan calon ini."

Hasil wawancara dengan seluruh informan menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan politik di Partai Golkar Kota Jambi tidak hanya ditentukan oleh mekanisme formal organisasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur informal berupa peran tokoh senior dan figur ketua partai dalam menjaga stabilitas internal. Ketika DPP menetapkan pasangan Maulana–Diza sebagai calon wali kota, muncul ketegangan di tingkat daerah karena aspirasi struktural PL, PK, dan DPD II sebelumnya mengusung Budi Setiawan secara bulat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan prosedural memainkan peran penting dalam mempertahankan solidaritas Partai Golkar di Kota Jambi setelah perselisihan terkait pemilihan calon wali kota dalam Pemilihan Umum Daerah Serentak 2024. Kepatuhan pimpinan partai terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), pedoman pencalonan, dan mekanisme pengambilan keputusan multilevel berhasil meredakan ketegangan ketika usulan daerah bertentangan dengan keputusan pusat. Dalam proses ini, peran ketua DPD II juga sangat krusial melalui pemberian contoh, penerimaan keputusan DPP, dan pendekatan langsung kepada anggota yang kecewa. Kombinasi mekanisme formal dan pengaruh figur karismatik menjelaskan mengapa solidaritas Golkar tetap terjaga meskipun terdapat perbedaan aspirasi yang mendalam di tingkat internal.

Berdasarkan temuan ini, studi ini merekomendasikan agar Partai Golkar memperkuat penyebaran informasi mengenai mekanisme pencalonan sejak tahap awal, meningkatkan pendidikan politik anggota mengenai fungsi hierarki partai, dan menyeimbangkan penggunaan survei elektabilitas dengan masukan dari struktur regional. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menilai ketahanan partai setelah pemilihan regional, karena studi ini belum mengevaluasi dinamika jangka panjang setelah kontestasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan prosedural dan memperkuat stabilitas organisasi dalam pemilihan mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Anawati, D. M., & Al-Hamdi, R. (2020). Soliditas partai dan stabilitas perolehan suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 105–125. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.4636>
- Firman Noor. (2015). *Perpecahan dan soliditas partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di dekade pertama reformasi*. LIPI Press.
- Idayat, F., & Prasetyo, A. (2022). Konflik elite dan penyelesaian internal pada Pilkada serentak. *Jurnal Politik Lokal*, 5(1), 77–93.
- JambiLink.id. (2024). *Budi Setiawan deklarasikan dukungan dan tegaskan Golkar solid bersama Maulana–Diza*. JambiLink.id. <https://jambilink.id/post/1524/budi-setiawan-deklarasikan-dukkungan-dan-tegaskan-golkar-solid-bersama-maulana-diza>
- Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. (2024). *Hasil Pemilu Legislatif Kota Jambi 2024*. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi. <https://jambi.kpu.go.id/>
- MakalamNews. (2024). *Partai Golkar lebih pilih Maulana–Diza Pilwako Jambi 2024 daripada dukung Budi Setiawan, ini sebabnya*. MakalamNews. <https://www.makalamnews.id/2024/08/partai-golkar-lebih-pilih-maulana-diza.html>
- Mietzner, M. (2021). Fragmentasi elit dan konsolidasi internal partai politik di Indonesia pasca reformasi. *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(3), 415–434. <https://doi.org/10.1017/S0022463421000300>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nurdin, R. (2021). Kepemimpinan prosedural dalam struktur partai politik. *Jurnal Administrasi Publik dan Politik*, 14(3), 201–215.
- Puja Dewangga, & Solihah, R. (2023). Rekrutmen calon anggota DPRD Partai Golkar di Kabupaten Majalengka menjelang Pemilu 2024. *Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(1), 66–87. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/index>
- Sandi, R., & Mulyadi, B. (2021). Strategi partai dalam menentukan kandidat pada Pilkada. *Jurnal Pemilu dan Kepartaian*, 4(1), 55–70.
- Sari, L., & Ramadhan, I. (2022). Loyalitas kader sebagai pilar soliditas partai politik. *Jurnal Sosial Politik*, 13(2), 98–112.

- Subekti, D., & Al-Hamdi, R. (2024). Soliditas internal partai berkuasa di Indonesia dalam mengusung anak presiden di Pemilihan Walikota Surakarta 2020. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 121–138. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i2.22234>
- Surbakti, A. (2020). Dinamika hubungan pusat dan daerah dalam struktur partai politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 121–135. (Catatan: nama jurnal disesuaikan berdasarkan format umum karena tidak dicantumkan di sumber)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. (2020). <https://jdih.setneg.go.id>